

Peran DPR RI dalam Mewadahi Aspirasi Publik: Studi Kasus Gresik–Lamongan

*The Role of the House of Representatives of the Republic of Indonesia
in Accommodating Public Aspirations: A Case Study of Gresik–Lamongan*

Mesu Reh Kasudarman

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
Email: mesureh2@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 13 Juni 2025
Direvisi: 2 Oktober 2025
Disetujui: 16 Oktober 2025

doi: 10.22212/jp.v16i2.5021

Abstract

This study discusses the role of members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) in channeling the aspirations of the people in the Gresik and Lamongan constituencies. Through the qualitative approach method of case studies, this study highlights the dynamics of political communication that occurs during the recess period, namely when legislative members go directly to constituents to listen to public input and complaints. David Easton's theory of political systems, the theory of political representation from Pitkin and Mansbridge, and the approach to central-regional relations within the framework of decentralization are used as the basis of the analysis. The results of the study show that members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia have a strategic role as a bridge between local interests and national policies. However, this role is not easy to execute. Challenges such as limited visiting times, high public expectations, and state budget constraints often hinder the realization of aspirations into concrete policies. As a result, many residents feel disappointed and do not believe that their aspirations are really being fought. Public trust in the legislature was also affected. In this context, recess must be seen not just as a formal activity, but as a space for meaningful and sustainable dialogue. This study recommends the importance of strengthening two-way communication mechanisms, active community involvement, and real follow-up on each aspiration gathered. That way, members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia can more effectively carry out their representation functions, as well as strengthen the quality of participatory democracy at the local level.

Keywords: DPR-RI; Recess; Community Aspirations; Political Communication; Local Representation

Abstrak

Penelitian ini membahas peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Gresik dan Lamongan. Melalui metode pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menyoroti dinamika komunikasi politik yang terjadi selama masa reses, yakni saat anggota legislatif turun langsung ke konstituen untuk mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat. Teori sistem politik David Easton, teori representasi politik dari Pitkin dan Mansbridge, serta pendekatan hubungan pusat-daerah dalam kerangka desentralisasi digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPR RI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional. Namun, peran ini tidak mudah dijalankan. Tantangan seperti keterbatasan waktu kunjungan, ekspektasi masyarakat yang tinggi, dan kendala anggaran negara sering kali menghambat realisasi aspirasi menjadi kebijakan konkret. Akibatnya, banyak warga merasa kecewa dan tidak percaya bahwa aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan. Kepercayaan publik

terhadap lembaga legislatif pun turut terdampak. Dalam konteks ini, reses harus dilihat bukan sekadar kegiatan formal, melainkan ruang dialog yang bermakna dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan mekanisme komunikasi dua arah, pelibatan masyarakat secara aktif, serta tindak lanjut yang nyata atas setiap aspirasi yang dihimpun. Dengan begitu, anggota DPR RI dapat lebih efektif menjalankan fungsi representasinya, serta memperkuat kualitas demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Kata Kunci: DPR-RI; Reses; Aspirasi Masyarakat; Komunikasi Politik; Representasi Lokal

Pendahuluan

Dalam ranah politik, komunikasi memegang peran yang sangat vital dan tidak dapat dipisahkan dari seluruh aktivitas politik. Melalui proses komunikasi, pesan-pesan serta tujuan politik dapat disampaikan secara efektif dan sesuai dengan maksud yang diharapkan. Komunikasi politik sendiri merupakan suatu bidang kajian yang meneliti perilaku serta aktivitas komunikasi yang bersifat politik, yang memiliki konsekuensi politik atau dapat memengaruhi perilaku politik individu maupun kelompok. Menurut Pureklolon, komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses penyampaian simbol-simbol atau lambang-lambang yang mengandung pesan-pesan politik dari individu atau kelompok kepada pihak lain, dengan tujuan memperluas wawasan, membentuk pola pikir, serta memengaruhi sikap dan perilaku sasaran politik.¹

Dalam praktik komunikasi politik, tidak cukup hanya mengandalkan penyampaian pesan, tetapi juga diperlukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu strategi komunikasi yang diterapkan oleh anggota DPR adalah melalui kegiatan kunjungan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menegaskan bahwa salah satu kewajiban DPR adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.²

Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang peranan utama sebagai pemilik kedaulatan. Namun, pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara, melainkan melalui wakil-wakil yang dipilih untuk duduk di lembaga legislatif, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI memegang tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar terwakili dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Peran anggota DPR RI dalam menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sangat krusial, karena mereka lah penghubung antara kepentingan rakyat dan kebijakan negara. Aspirasi masyarakat mencakup berbagai hal, mulai dari kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga isu-isu strategis seperti pembangunan daerah, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, kemampuan anggota DPR RI untuk mendengarkan, memahami, dan memperjuangkan aspirasi tersebut menjadi ukuran keberhasilan demokrasi representatif di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penyaluran aspirasi masyarakat tidak selalu berjalan efektif. Tantangan seperti keterbatasan komunikasi politik, dominasi kepentingan partai atau kelompok tertentu, hingga rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap wakil rakyat kerap

1 Pureklolon, Thomas P. *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.

2 Susanto, Hendro, et al. "Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1)." *Jurnal Representamen* Vol 7.01 (2021).

menjadi hambatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana anggota DPR RI benar-benar mampu merepresentasikan suara rakyat sekaligus membangun legitimasi kelembagaan legislatif.

Lebih khusus lagi, konteks ini dapat dilihat secara nyata di daerah Kabupaten Gresik dan Lamongan, dua daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda tetapi saling melengkapi. Gresik sebagai kawasan industri strategis dan Lamongan dengan basis pertanian serta perikanannya yang kuat, mencerminkan ragam kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang kompleks. Kompleksitas ini menuntut anggota DPR RI untuk lebih peka dan adaptif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihan mereka. Apalagi, potensi pembangunan di kedua kabupaten tersebut sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan nasional, sehingga keterwakilan politik yang efektif dari DPR RI menjadi kunci untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terwujud dalam bentuk kebijakan publik yang relevan.

Oleh karena itu, Penelitian ini menjadi penting karena menyangkut fungsi utama lembaga legislatif dalam sistem demokrasi, yakni mewakili suara rakyat, menyusun kebijakan publik, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam praktiknya, fungsi tersebut hanya dapat berjalan dengan efektif jika terdapat komunikasi yang baik antara wakil rakyat (dalam hal ini anggota DPR RI) dan masyarakat yang mereka wakili. Salah satu bentuk komunikasi itu adalah melalui kegiatan reses, yang merupakan momen bagi anggota DPR untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Khususnya di daerah seperti Kabupaten Gresik dan Lamongan, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda namun saling melengkapi Gresik sebagai daerah industri dan Lamongan sebagai daerah agraris dan pesisir aspirasi masyarakat menjadi sangat beragam dan kompleks. Namun, kenyataannya tidak semua aspirasi yang disampaikan saat reses dapat direalisasikan dalam kebijakan, terutama karena keterbatasan anggaran negara dan kompleksitas proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi kebijakan, yang pada akhirnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap wakil rakyat maupun lembaga legislatif itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, fungsi representasi sering kali mengalami tantangan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Masih terdapat jarak antara aspirasi masyarakat dengan respons kebijakan yang diberikan oleh wakil rakyat. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi publik dalam mekanisme penyampaian aspirasi dan minimnya transparansi dalam pelaporan kinerja anggota legislatif turut memperlemah fungsi representasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran anggota DPR RI dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Gresik dan Lamongan. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana fungsi representasi dijalankan secara substantif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas penyaluran aspirasi dari tingkat lokal ke tingkat nasional. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan demokrasi representatif di Indonesia melalui peningkatan kualitas hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.

Kerangka Teori/Analisis

Teori Sistem Politik

Dalam kerangka teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton, politik dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas komponen input, konversi, *output*, dan *feedback*. Sistem ini menggambarkan bagaimana aspirasi dan tuntutan masyarakat (*input*) diolah oleh lembaga-lembaga negara (*konversi*) untuk menghasilkan kebijakan publik (*output*), yang kemudian dievaluasi kembali oleh masyarakat melalui umpan balik (*feedback*). David Easton menekankan bahwa sistem politik yang sehat ditandai oleh keberlangsungan siklus ini secara dinamis dan responsif, sehingga sistem mampu bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai tekanan sosial.³ Bila merujuk pada judul diatas (*input*) sendiri ialah masukan dari masyarakat Gresik - Lamongan dalam beberapa bentuk seperti aspirasi, tuntutan, dan dukungan. Sedangkan (*konversi*) sendiri ialah pengolahan aspirasi masyarakat yang masuk kemudian diproses oleh DPR-RI melalui fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Untuk (*output*) sendiri ialah keluaran dari hasil kebijakan public yang dihasilkan melalui advokasi anggota DPR RI. Untuk (*feedback*) sendiri ialah Jika kebijakan yang sesuai aspirasi (misalnya pembangunan jalan tol, bantuan pendidikan, perbaikan layanan publik), masyarakat memberi dukungan positif yang memberi umpan balik berupa kepercayaan pada wakil rakyat, partisipasi dalam kegiatan politik, dan loyalitas elektoral.

Pandangan ini diperkuat oleh Macridis yang menyatakan bahwa sistem politik pada dasarnya adalah suatu mekanisme untuk pengambilan keputusan yang bersifat otoritatif bagi masyarakat.⁴ Keputusan-keputusan tersebut dihasilkan oleh berbagai organ negara, termasuk lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, terjadi proses negosiasi, kompromi, dan artikulasi berbagai kepentingan yang berasal dari kelompok sosial, partai politik, serta institusi-institusi pemerintah.⁵ Dalam konteks Kabupaten Gresik dan Lamongan, peran anggota DPR RI menjadi sangat strategis dalam fase konversi, yaitu sebagai agen representatif yang menjembatani antara tuntutan masyarakat lokal dengan kebijakan nasional. Anggota legislatif bertugas mengartikulasi dan mengagregasi berbagai aspirasi masyarakat, baik melalui forum-forum resmi seperti reses, rapat dengar pendapat, maupun melalui kanal informal lainnya. Proses ini menuntut kepekaan terhadap kebutuhan konstituen, kemampuan dalam membangun jaringan politik, serta kapabilitas dalam merumuskan dan memperjuangkan agenda publik di tingkat nasional.

Efektivitas peran anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gresik-Lamongan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan pemerintah pusat mencerminkan aspirasi lokal, baik dalam bentuk alokasi anggaran pembangunan, regulasi sektoral, maupun program-program afirmatif lainnya. Ketika aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang konkret dan bermanfaat, maka proses konversi dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, Easton juga mengingatkan pentingnya *feedback loop*, yakni mekanisme umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Dalam kerangka ini, anggota DPR RI tidak hanya berperan sebagai penyambung aspirasi (*input*), tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab menjelaskan dan mengevaluasi dampak kebijakan (*output*) di hadapan konstituen. Melalui interaksi ini, masyarakat memberikan penilaian terhadap kinerja representatif legislatif, yang

3 Menurut (David Easton, 1953) dalam Badrun, Ubedilah. *Sistem Politik Indonesia*. Bumi Aksara, (2022).

4 Macridis, Roy C. "Comparative politics and the study of government: the search for focus." *Comparative politics* 1.1 (1968): 79-90.

5 Pito, Toni Andrianus, et al. *Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia, 2022.

pada gilirannya akan memengaruhi dinamika representasi politik di masa mendatang.

Dengan demikian, teori sistem politik Easton dan gagasan Macridis memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana anggota DPR RI menjalankan fungsi representasi dalam sistem politik demokratis. Peran mereka tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan substansial dalam memastikan bahwa proses politik berjalan secara partisipatif, responsif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat daerah seperti Gresik dan Lamongan.

Teori Perwakilan Politik

Dalam kajian ilmu politik kontemporer, teori perwakilan mengalami perkembangan signifikan dalam menjelaskan kompleksitas relasi antara wakil rakyat dan konstituennya, terutama dalam konteks demokrasi prosedural yang semakin menuntut partisipasi dan akuntabilitas. Secara klasik, teori representasi dikembangkan oleh Pitkin, namun berbagai studi lanjutan dalam dekade terakhir telah memperluas dan merekonstruksi pemahaman mengenai dimensi *substantive representation* sebagai aspek utama dari keberhasilan fungsi representatif.⁶

Menurut Karen Celis dan Sarah Childs, *substantive representation* harus dipahami tidak hanya sebagai tindakan legislator dalam memperjuangkan isu konstituen, tetapi juga bagaimana proses itu melibatkan komunikasi aktif, keterlibatan deliberatif, dan refleksi terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.⁷ Dalam konteks ini, peran anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gresik - Lamongan menjadi krusial sebagai aktor politik yang bertugas mentransformasikan aspirasi lokal ke dalam bentuk kebijakan nasional yang relevan dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Mansbridge menekankan bahwa *substantive representation* bersifat kontekstual dan interaktif tidak cukup hanya dengan keterlibatan formal dalam proses legislasi, tetapi juga dengan membangun hubungan sosial dan politik yang intensif dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan *constituency service* sebagaimana dikembangkan oleh Fenno dan dikaji ulang oleh Clark dan Eisenstein, yang menempatkan komunikasi rutin, kehadiran fisik di daerah pemilihan, serta pemanfaatan media digital sebagai indikator kinerja representatif yang substantif dan akuntabel.⁸

Dalam konteks Kabupaten Gresik dan Lamongan, anggota DPR RI dituntut tidak hanya menjadi juru bicara konstituen, tetapi juga *policy broker* yang mampu mengadvokasi kepentingan lokal dalam forum nasional. Kegiatan seperti reses, forum dialog publik, serta pemanfaatan media sosial menjadi bagian integral dari mekanisme penyaluran aspirasi. Selain itu, keterlibatan legislator dalam pengawasan kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada pembangunan wilayah Gresik - Lamongan menunjukkan aktualisasi dari *substantive representation* dalam praktik politik nyata.

Dengan demikian, peran anggota DPR RI dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Gresik - Lamongan dapat dipahami dalam kerangka *substantive representation* yang tidak hanya bersifat formal dan simbolik, melainkan juga mengutamakan pembelaan aktif terhadap kepentingan daerah melalui komunikasi intensif dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi terwujudnya representasi politik yang berkeadilan, inklusif, dan adaptif terhadap tuntutan demokrasi lokal kontemporer.

6 Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*, (California: University Of California Press, 1967).

7 Celis, Karen. "On substantive representation, diversity, and responsiveness." *Politics & Gender* 8.4 (2012): 524-529.

8 Andriyan, Dody Nur. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2018): 79-94.

Teori Fungsi Aspirasi Lembaga Perwakilan

Pasca Dalam kajian ilmu politik, lembaga perwakilan (*legislature*) dipandang sebagai institusi utama dalam sistem demokrasi yang mengemban fungsi representasi rakyat. Salah satu fungsi fundamentalnya adalah fungsi aspirasi, yaitu kemampuan lembaga perwakilan untuk menyerap, menyalurkan, serta memperjuangkan kepentingan dan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Fungsi aspirasi ini erat kaitannya dengan teori representasi politik. Pitkin menjelaskan representasi bukan hanya sekadar kehadiran formal wakil rakyat dalam parlemen, melainkan juga keterhubungan substantif antara wakil dengan masyarakat yang diwakili.⁹ Dengan demikian, fungsi aspirasi merupakan wujud konkret dari *substantive representation*, yaitu bagaimana wakil benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Macridis memandang sistem politik sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat otoritatif bagi masyarakat.¹⁰ Dalam kerangka ini, lembaga perwakilan memiliki posisi sentral sebagai kanal aspirasi rakyat agar keputusan politik yang dihasilkan tidak semata-mata produk elit, melainkan mencerminkan kebutuhan dan kehendak masyarakat luas.

Secara normatif, fungsi aspirasi lembaga perwakilan di Indonesia dilembagakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 70 huruf (h), ditegaskan bahwa salah satu tugas anggota DPR adalah “menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat”. Hal ini menegaskan bahwa fungsi aspirasi bukan hanya fungsi tambahan, tetapi bagian inheren dari tugas legislator.

Dalam praktiknya, fungsi aspirasi dijalankan melalui berbagai mekanisme, antara lain: reses anggota DPR di daerah pemilihan, forum dengar pendapat umum (*public hearing*), pengaduan masyarakat, serta interaksi langsung melalui kegiatan sosialisasi maupun kunjungan kerja. Fungsi ini sekaligus menjadi tolak ukur efektivitas representasi politik; semakin aspirasi masyarakat terakomodasi, semakin tinggi pula legitimasi lembaga perwakilan di mata publik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran anggota DPR RI dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Gresik – Lamongan. Pendekatan ini dipilih karena topik yang diteliti bersifat kontekstual dan berkaitan erat dengan pengalaman, pandangan, serta praktik politik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau data kuantitatif.¹¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu memusatkan perhatian pada satu kasus khusus, yakni pada anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gresik – Lamongan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai proses penyaluran aspirasi, hambatan yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap kinerja wakil mereka di parlemen.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: Wawancara semi-terstruktur, yang dilakukan terhadap narasumber seperti tokoh masyarakat yang pernah berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi. Jenis wawancara ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk

9 Bitton, Davis. "Pitkin, Hanna Fenichel," The Concept of Representation"(Book Review)." *The Historian* 31.1 (1968): 91.

10 Macridis, Roy C. "Comparative politics and the study of government: the search for focus." *Comparative politics* 1.1 (1968): 79-90.

11 Yuliani, Wiwin. "Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2.2 (2018): 83-91.

menggali informasi secara lebih mendalam. Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan kegiatan reses anggota DPR RI, berita media massa, serta arsip yang relevan dengan aktivitas penyaluran aspirasi. Studi literatur, yang digunakan untuk memperkuat kerangka teori dan memahami konsep-konsep penting seperti perwakilan politik, fungsi legislatif, serta mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola, tema, atau kategori yang muncul dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis ini membantu peneliti dalam menyusun kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kabupaten Gresik - Lamongan

Profil Geografis dan Demografis

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur. Secara topografis, wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian 0–12 meter di atas permukaan laut, sementara pada bagian utara, tepatnya Kecamatan Panceng, mencapai ketinggian 25 meter. Dengan luas wilayah sekitar 1.195 km² yang terbagi ke dalam 18 kecamatan dan 356 desa/kelurahan, perekonomian daerah ini ditopang oleh sektor Perkebunan meliputi komoditas kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan jambu mete serta sektor jasa, khususnya subsektor pariwisata yang terus mengalami perkembangan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional.¹²

Masyarakat Kabupaten Gresik umumnya bekerja di tiga sektor utama, yaitu sektor jasa, manufaktur, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik tahun 2023, sektor jasa merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dengan persentase sekitar 47,77%, meliputi perdagangan, akomodasi dan makan-minum, transportasi, keuangan, hingga layanan pemerintahan. Sektor manufaktur menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 38,02%, mencakup industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, dan utilitas, yang sejalan dengan karakteristik Gresik sebagai kawasan industri. Adapun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyerap sekitar 14,21% tenaga kerja, menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari basis agraris menuju sektor industri dan jasa. Data ini menggambarkan dinamika pembangunan ekonomi Gresik yang ditopang oleh modernisasi industri sekaligus berkembangnya sektor jasa dalam mendukung pertumbuhan wilayah.¹³

Untuk di Adapun Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah sekitar 1.752,21 km² atau 3,67% dari total luas Provinsi Jawa Timur, sehingga memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 kecamatan, 462 desa, dan 12 kelurahan, dengan batas wilayah meliputi Laut Jawa di utara, Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di barat, Kabupaten Jombang dan Mojokerto di selatan, serta Kabupaten Gresik di timur. Pemanfaatan lahan di wilayah ini mencakup kawasan hutan produksi seluas 31.437,57 hektare, area permukiman sekitar 30.263 hektare, serta kawasan peruntukan lainnya, yang secara keseluruhan mencerminkan keragaman fungsi ruang dan potensi pengembangan wilayah Lamongan.¹⁴

12 Rahmawati, Roselina, Rendy Dwi Pangesti, and Rifqi Aulia Abdillah. "Pemetaan Kondisi Jalan Berdasarkan Iri Roadroid di Kabupaten Gresik Wilayah Selatan." *Jurnal Riset Rekayasa Sipil* 4.2 (2021): 83-94.

13 BPS Kabupaten Gresik, "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Agustus 2023", Diakses pada tanggal 28 September 2025. gresikkab.bps.go.id.

14 BAPPELITBANGDA, "Deskripsi Singkat Kabupaten Lamongan" Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025. [bappelitbangda.lamongankab.go.id](http://lamongankab.go.id)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, sebagian besar penduduk Lamongan bekerja di sektor jasa dengan persentase 45,60 persen, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 32,84 persen, dan sektor industri sebesar 21,56 persen. Sektor pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu fondasi utama perekonomian daerah, bahkan Lamongan dikenal sebagai “lumbung pangan regional dan nasional” karena produksi padinya yang sangat tinggi. Sementara itu, sektor industri yang meliputi pertambangan, pengolahan, listrik/gas/air, dan konstruksi, serta sektor jasa yang meliputi perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan, terus berkembang seiring perubahan struktur ekonomi. Komposisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran menuju sektor tersier (jasa), meskipun sektor primer (pertanian) tetap dominan dalam menyerap tenaga kerja, sehingga kebijakan pembangunan daerah perlu diarahkan pada penguatan sektor jasa sekaligus mempertahankan basis pertanian sebagai penopang utama perekonomian Lamongan.

Kondisi Sosial – Politik Masyarakat di Daerah Kabupaten Gresik - Lamongan

Dalam konteks penelitian mengenai dinamika politik di Kabupaten Gresik, penting untuk memahami karakteristik wilayah ini yang unik. Kabupaten Gresik dikenal sebagai daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, yang tercermin dalam kehidupan sosial masyarakatnya yang cenderung harmonis dan minim konflik terbuka. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk meneliti bagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal memengaruhi partisipasi politik dan komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat. Namun, meskipun secara umum situasi politik di Gresik tampak stabil, terdapat dinamika tertentu yang perlu diperhatikan.

Selain itu, kasus-kasus seperti sengketa tanah di Kecamatan Manyar dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan retribusi kawasan wisata menunjukkan adanya potensi konflik yang bersumber dari kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya. Hal ini menandakan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara efektif.

Sedangkan Kabupaten Lamongan, yang terletak di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah dengan karakteristik sosial dan politik yang cukup dinamis. Secara geografis, Lamongan memiliki bentang wilayah yang bervariasi, mulai dari kawasan pesisir hingga perbukitan, dengan dominasi penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman ini turut membentuk lanskap sosial dan politik masyarakatnya. Secara umum, situasi sosial politik di Lamongan tergolong kondusif. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam berbagai proses demokrasi, terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk daerah pemilihan (Dapil) Gresik-Lamongan dalam pemilihan anggota DPR RI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil meraih perolehan suara terbanyak. PDIP mencatatkan total suara sah sebanyak 160.805 suara, disusul oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dengan jumlah 145.624 suara, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh 124.648 suara. Data ini menunjukkan dominasi tiga partai besar dalam kontestasi politik di Dapil Lamongan serta mencerminkan pola preferensi politik masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan data Pemilu 2024, Dari 1.035.507 pemilih di Kabupaten Lamongan, terdapat 82,07 persen yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024, sebuah angka yang menunjukkan antusiasme dan kesadaran

politik warga dalam menggunakan hak pilihnya secara aktif. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat Lamongan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap arah kebijakan pemerintahan serta peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Tabel 1. Data Anggota DPR-RI Dapil X Jatim

No.	Nama Anggota	Partai Pengusung	Hasil Suara
1	H. Nasyirul Falah Amru, S.E., M.A.P.	PDIP	167.514
2	Nila Yani Hardiyanti, S.I.Kom.	PDIP	95.681
3	Thoriq Majiddanor, S.E., S.H., M.H.P.	Partai Nasdem	94.377
4	Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.	PKB	80.974
5	H. Khilmi	Partai Gerindra	84.110
6	Ahmad Labib, S.H.I., M.H.	Partai Golkar	78.174

Namun demikian, Lamongan juga menunjukkan dinamika politik yang cukup kompleks. Walaupun secara umum berlangsung damai, dalam beberapa momentum politik tertentu, muncul ekspresi politik yang lebih kritis dari sebagian elemen masyarakat, khususnya kalangan muda. Salah satu contohnya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Joko Tingkir Lamongan pada tahun 2025. Aksi tersebut berlangsung di depan gedung DPRD Lamongan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesadaran politik yang tinggi di kalangan generasi muda Lamongan serta keberanian mereka untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka melalui mekanisme demokratis.

Selain aspek politik, isu-isu sosial seperti tingkat kemiskinan juga turut memengaruhi dinamika masyarakat. Meskipun angka kemiskinan di Lamongan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, tren penurunannya menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan sosial ekonomi di wilayah ini. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tersebut, sinergi antar elemen masyarakat menjadi sangat penting, terutama dalam menciptakan ruang dialog yang terbuka, serta dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan politik. Secara keseluruhan, Kabupaten Lamongan mencerminkan wilayah dengan kombinasi antara stabilitas sosial-politik dan partisipasi publik yang tinggi, disertai dengan ruang ekspresi politik yang terus berkembang. Kondisi ini menjadikan Lamongan sebagai contoh daerah yang relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam studi mengenai komunikasi politik, representasi politik, dan dinamika demokrasi lokal.¹⁶

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika politik di Kabupaten Gresik dan Lamongan, tetapi juga untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta untuk meningkatkan partisipasi politik yang konstruktif dan mencegah potensi konflik di masa depan.

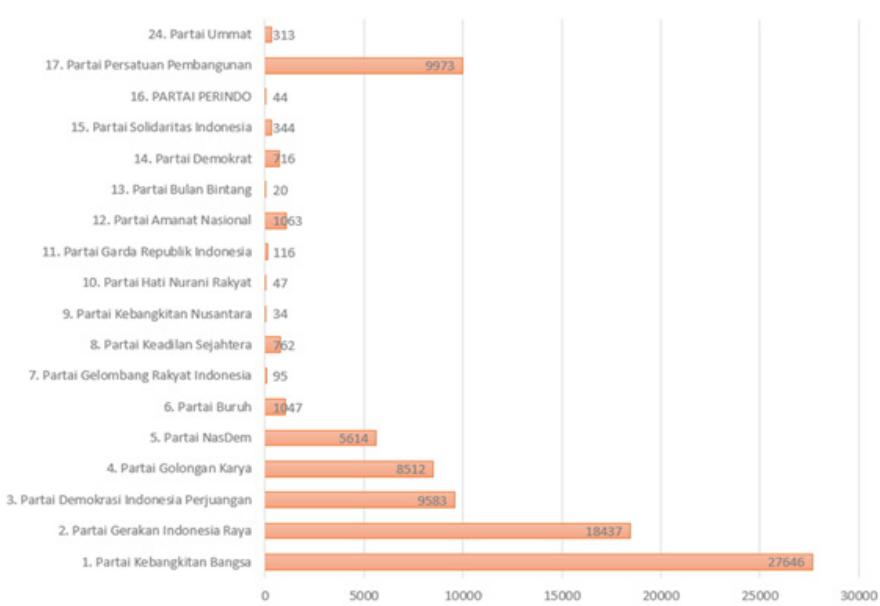
15 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, "Statistik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024" Diakses Pada Tanggal 12 Mei (2025) Pada Halaman 3-6. lamongankab.bps.go.id

16 Supriyanto, Budi, John Suprihanto, and Muhammad Awal Satrio Nugroho. *Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Magelang*. Diss. STIE Widya Wiwaha, (2018).

Perolehan Suara Sah, Pemilu 2024	
Partai Politik	Jumlah
Partai Kebangkitan Bangsa	124.648
Partai Gerindra	73.930
PDI Perjuangan	160.805
Partai Golongan Karya	145.624
Partai Nasional Demokrat	77.976
Partai Buruh	3.614
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.794
Partai Keadilan Sejahtera	11.312
Partai Kebangkitan Nusantara	457
Partai Persatuan Pembangunan	46.893
Partai Solidaritas Indonesia	14.801
Partai Amanat Nasional	60.512
Partai Hanura	1.671
Partai Demokrat	31.805
Partai Ummat	6.702
Partai Perindo	8.237
Partai Bulan Bintang	1.117
Partai Garda Republik Indonesia	1.078

Sumber: KPUD Kabupaten Lamongan

Gambar 1. Partisipasi perolehan suara pemilu pada kabupaten lamongan.



Gambar 2. Partisipasi perolehan suara pemilu pada kabupaten Gresik.

Peran Anggota DPR-RI dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan dalam menyalurkan informasi masih banyak permasalahan yang timbul, yang dihadapi baik oleh anggota DPR-RI Dapil Jatim X Kabupaten Gresik dan Lamongan maupun oleh masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor ketika anggota DPR-RI Dapil Kabupaten Gresik dan Lamongan bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut:

Waktu dalam Pertemuan dengan Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan anggota DPR-RI, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Gresik-Lamongan, diperlukan perencanaan yang terstruktur. Setiap agenda seharusnya disusun dalam rencana kerja yang jelas, terutama pada masa reses yang secara khusus diperuntukkan bagi anggota dewan untuk bertemu langsung dengan konstituen. Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar sidang, khususnya di luar gedung DPR, untuk melaksanakan kunjungan kerja. Kegiatan ini bertujuan menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung, serta menindaklanjuti pengaduan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam praktiknya, kunjungan kerja terbagi menjadi 3 yakni: kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses dapat dilakukan 4-5 kali dalam satu tahun persidangan dengan durasi antara lima hingga 30 hari, Kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses atau pada masa sidang 1 kali dalam setahun, sementara kunjungan di luar masa reses diatur paling lama 8 hari dalam satu tahun.

Berdasarkan kesempatan yang saya dapat untuk mewawancara salah satu Anggota DPR-RI Komisi XI Dapil Jatim X Kabupaten Gresik - Lamongan di peroleh informasi bahwa yang dimana hasil wawancara dengan bapak Thoriq Majiddanor, selaku Anggota DPR-RI Komisi XI Dapil Jatim X Gresik-Lamongan, diketahui bahwa pelaksanaan reses sendiri seringkali menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan yang menonjol adalah benturan jadwal dengan berbagai agenda mendesak di pusat, seperti rapat kerja, penerimaan tamu resmi, maupun kegiatan lain yang undangannya datang secara tiba-tiba dan tidak dapat ditolak. Kondisi ini menyebabkan jadwal reses yang sebelumnya telah disusun dengan baik harus ditunda, sehingga berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat yang telah dipersiapkan untuk menerima kunjungan anggota dewan. Selain itu, keterbatasan waktu dan luasnya cakupan wilayah pemilihan menyebabkan tidak semua desa dapat dikunjungi dalam satu masa reses, sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat secara merata di seluruh daerah.

Adapun bentuk kegiatan yang umumnya dilakukan anggota DPR-RI dalam masa reses antara lain: Pertemuan langsung dengan masyarakat di desa, kecamatan, atau kelompok tertentu untuk mendengarkan aspirasi, Dialog interaktif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, maupun pelaku usaha local, Kunjungan lapangan ke lokasi yang menjadi pusat permasalahan, seperti sektor pertanian, industri, atau infrastruktur public, Penyerapan pengaduan atau usulan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam forum rapat DPR maupun kementerian terkait, dan Sosialisasi kebijakan atau program pemerintah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah pemilihan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan fungsi representasi DPR dalam menjembatani aspirasi rakyat dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Lebih jauh lagi, peran anggota DPR-RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat pada dasarnya diwujudkan melalui mekanisme formal maupun non-formal yang melekat pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Aspirasi yang dihimpun selama masa reses tidak berhenti pada tahap pencatatan semata, melainkan diolah dan disalurkan dalam forum resmi DPR maupun dalam komunikasi politik dengan kementerian/lembaga terkait. Bentuk nyata dari perjuangan aspirasi tersebut antara lain: penyampaian aspirasi dalam rapat komisi, rapat kerja, maupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerja eksekutif sebagai bentuk artikulasi kepentingan masyarakat; pengusulan program pembangunan daerah dalam pembahasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kebutuhan lokal dapat memperoleh alokasi anggaran yang proporsional; pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah di daerah pemilihan, agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat; serta fasilitasi tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui rekomendasi politik maupun penyampaian langsung kepada lembaga pemerintah terkait. Dengan demikian, peran anggota DPR-RI tidak hanya sebatas menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan aspirasi tersebut mendapatkan ruang dalam proses pengambilan keputusan politik nasional dan daerah, sehingga fungsi representasi dapat terwujud secara substantif.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Masa Reses

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga di sebuah desa di Kabupaten Gresik-Lamongan, terungkap bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI Komisi XI, Bapak Thoriq Majiddanor, tergolong sangat rendah. Meskipun warga telah mendapat informasi dan undangan sebelumnya, hanya sedikit yang hadir dalam acara tersebut. Narasumber mengungkapkan bahwa rendahnya kehadiran masyarakat bukan tanpa alasan. Banyak warga yang merasa kecewa dengan kinerja dan dampak yang dihasilkan dari program atau kebijakan yang selama ini dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara harapan masyarakat dengan realisasi pembangunan atau aspirasi yang dibawa oleh wakil rakyat. "Sejurnya, partisipasi masyarakat saat kegiatan reses itu sangat rendah. Padahal, kami sudah diberi tahu dan diundang untuk hadir. Tapi tetap saja, yang datang bisa dihitung dengan jari. Bukan tanpa alasan, ya. Banyak dari kami merasa kecewa dengan apa yang terjadi selama ini." (Wawancara dengan A**** Warga Manyar di Kabupaten Gresik)

Kekecewaan masyarakat terhadap kegiatan reses Anggota DPR-RI Dapil Jatim X, muncul karena ketiadaan tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya. Narasumber menjelaskan bahwa reses telah dilakukan beberapa kali di desa mereka, namun berbagai keluhan dan masukan yang diajukan warga seolah tidak mendapat respons nyata. "Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi, tapi tidak pernah ada realisasi. Jadi, apa gunanya kami datang lagi jika akhirnya tidak ada perubahan?" (ujar narasumber). Persepsi ini memperkuat anggapan di kalangan warga bahwa kehadiran anggota DPR-RI hanya bersifat formalitas belaka, tanpa komitmen serius untuk menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Terungkap bahwa kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPR-RI Dapil Jatim X, dinilai tidak memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Narasumber dengan tegas menyatakan, "Betul. Hasil reses yang dulu-dulu juga belum terlihat dampaknya, Aspirasi kami hanya dicatat, lalu selesai begitu saja. Tidak ada kejelasan kelanjutannya. Jadi, wajar kalau masyarakat makin enggan untuk terlibat" (Ujar Narasumber). Fenomena yang terungkap dalam wawancara ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas mekanisme reses sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat. Tanpa perbaikan sistemik, dikhawatirkan akan terjadi erosi lebih lanjut terhadap partisipasi politik warga.

Berdasarkan pernyataan informan, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan reses oleh Anggota DPR-RI Komisi XI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Gresik - Lamongan harus sepenuhnya merefleksikan esensi dan tujuan utama dari kegiatan tersebut, yakni sebagai sarana penjaringan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui reses ini selanjutnya diharapkan dapat dirumuskan menjadi kebijakan yang relevan dan solutif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, anggota legislatif dari Dapil Gresik - Lamongan

memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki citra negatif yang mungkin ditinggalkan oleh anggota dewan sebelumnya, yang dinilai kurang optimal dalam mengadvokasi hasil aspirasi publik. Secara khusus, Anggota DPR-RI Komisi XI, Bapak Thoriq Majiddanor, dituntut untuk membangun komunikasi yang efektif dan konstruktif dengan masyarakat guna memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.



Gambar 3 & 4. Pada saat penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Gresik.

Dana Yang Terbatas dari Pemerintah dalam Merealisasikan Pembangunan

Dalam konteks komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, yang pada akhirnya merupakan bagian dari komunikasi politik, Anggota DPR-RI Dapil Jatim X dari Daerah Pemilihan Kabupaten Gresik - Lamongan, Bapak Thoriq Majiddanor, H. Nasyirul Falah Amru, S.E., M.A.P., Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. dan yang lain memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejauh mana aspirasi mereka dapat diwujudkan atau tidak dapat direalisasikan. Hal ini penting karena terdapat berbagai faktor penghambat dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun dalam tahap awal pembahasan anggaran telah dimasukkan berbagai program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seperti pembangunan sarana dan prasarana realisasi aspirasi tersebut kerap menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu, ketika Anggota DPR-RI menyampaikan hasil penjaringan aspirasi dari kegiatan reses, tidak semua usulan dapat diakomodasi, mengingat perlunya pertimbangan terhadap kemampuan fiskal negara. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Komisi XI DR. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. Diperoleh informasi bahwa salah satu tantangan utama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses adalah adanya ekspektasi tinggi dari masyarakat. Beliau menyampaikan:

"Masyarakat sangat menginginkan agar apa yang mereka sampaikan selama reses tidak hanya berakhir sebagai pembicaraan di atas meja, tetapi harus benar-benar terwujud dalam kebijakan. Mereka berharap agar aspirasi yang disampaikan selama reses tersebut dapat masuk dalam pembahasan anggaran negara dan diimplementasikan secara nyata." (Wawancara, Maret 2025)

Dalam praktik pelaksanaan reses, Anggota DPR-RI kerap menghadapi dilema komunikasi dengan konstituen, khususnya ketika menerima aspirasi masyarakat yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi. Anggota dewan cenderung merasa tidak nyaman untuk secara langsung menolak masukan dari masyarakat, sehingga seluruh aspirasi yang disampaikan pada saat reses tetap ditampung dan dilaporkan untuk dirumuskan bersama pemerintah pusat. Permasalahan muncul ketika usulan tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah pusat dalam pembahasan APBN harus mempertimbangkan skala prioritas demi menyesuaikan program dengan kapasitas fiskal nasional. Ketidakterpenuhan aspirasi ini seringkali menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, seolah-olah DPR tidak memperjuangkan tuntutan mereka. Padahal, aspirasi tersebut telah disampaikan secara formal oleh Anggota DPR-RI Komisi XI Dapil Gresik - Lamongan. Realisasinya bergantung pada kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat, yang kemungkinan akan mengakomodasi aspirasi tersebut dalam periode anggaran berikutnya jika belum dapat diimplementasikan saat ini.

Analisis Efektivitas Penyaluran Aspirasi

Keberhasilan pelaksanaan program reses memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani hubungan antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan konstituen mereka. Reses menjadi wadah strategis bagi anggota DPR RI untuk turun langsung ke daerah pemilihan, mendengarkan keluhan, kebutuhan, dan harapan masyarakat secara langsung. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun usulan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, reses berfungsi sebagai bentuk komunikasi dua arah yang efektif antara wakil rakyat di tingkat nasional dan warga di akar rumput. Dengan terjun langsung ke lapangan, anggota DPR RI dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan di daerah, yang kerap kali tidak terdeteksi dalam rapat atau forum formal di pusat. Oleh karena itu, reses menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis aspirasi konstituen.¹⁷

Keberhasilan program reses anggota DPR RI Dapil Gresik - Lamongan tidak hanya dinilai dari seberapa banyak masyarakat yang hadir, tetapi juga dari kualitas dialog yang terjadi selama kegiatan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan, kualitas interaksi sangat menentukan sejauh mana aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa ditindaklanjuti secara konkret. Ketika masyarakat merasa didengar dan dihargai, mereka cenderung akan lebih antusias untuk terlibat dalam kegiatan reses di masa mendatang.

Reses yang baik bukan hanya tentang mengumpulkan masukan, tetapi juga membuka ruang diskusi yang mendalam mengenai berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di Gresik dan Lamongan. Melalui diskusi ini, anggota DPR RI dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap permasalahan di lapangan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, reses menjadi sarana yang memperkuat kepercayaan antara wakil rakyat dan masyarakat. Selain itu, keberhasilan program reses juga sangat bergantung pada pelaksanaannya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan beberapa peraturan mulai dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, reses para

¹⁷ Sonni, Alem Febri, et al. "Aktivitas Humas DPRD Kota Palu Sebagai Mediator Aspirasi Masyarakat." *Kinesik* 8.2 (2021): 146-157.

dewan dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di daerah yang diwakilinya. Serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam peraturan DPR sendiri. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang juga mengatur mengenai reses, mulai dari waktu, jumlah peserta, hingga tata cara pengumpulan aspirasi. Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat merasa bahwa seluruh proses dijalankan secara terbuka dan profesional.¹⁸

Pemilihan lokasi reses juga memegang peran penting. Reses yang dilakukan di tempat-tempat yang strategis dan dekat dengan masyarakat yang menghadapi tantangan sosial atau ekonomi akan lebih efektif dalam menyerap aspirasi yang benar-benar dibutuhkan untuk perbaikan kondisi setempat. Akhirnya, kunci utama keberhasilan reses adalah komunikasi yang terbuka dan aktif antara anggota DPR RI dan masyarakat. Anggota DPR perlu memastikan bahwa suasana diskusi dalam reses bersifat terbuka, nyaman, dan inklusif, sehingga masyarakat tidak sungkan untuk menyampaikan harapan maupun kritik. Lebih dari itu, memberikan umpan balik atas aspirasi yang telah diterima juga penting agar masyarakat tahu bahwa suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga benar-benar ditindaklanjuti.

Dampak Kebijakan yang Dihasilkan dari Aspirasi Masyarakat

Kepuasan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan program reses. Hal ini karena tingkat kepuasan mencerminkan sejauh mana kegiatan reses mampu menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data yang ada, tingkat kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh hasil nyata yang muncul setelah aspirasi mereka disampaikan. Masyarakat akan merasa lebih puas ketika suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah nyata misalnya, dalam bentuk kebijakan atau pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Pandangan ini sejalan dengan apa yang ditekankan pentingnya respons cepat terhadap persoalan-persoalan yang diangkat saat reses. Masalah seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi lokal harus menjadi perhatian utama. Ketika aspirasi masyarakat benar-benar ditanggapi dan ditindaklanjuti, kepercayaan terhadap program reses dan terhadap wakil rakyat itu sendiri akan semakin meningkat.

Selain hasil yang dicapai, cara pelaksanaan program reses juga sangat memengaruhi kepuasan masyarakat. Jika proses reses dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif di mana mereka bukan hanya bisa menyampaikan aspirasi, tetapi juga mendapatkan tanggapan yang jelas dan tepat waktu maka kepercayaan serta kepuasan masyarakat akan meningkat. Ketika masyarakat melihat bahwa suara mereka benar-benar diperhatikan dan membawa hasil nyata, mereka akan merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses pembangunan.

Sebagai anggota DPR RI, penting bagi kami untuk tidak sekadar hadir dalam kegiatan reses, tetapi juga memastikan bahwa setiap masukan yang diterima dari masyarakat ditindaklanjuti

18 Maharani, Andina Elok Puri, and Yudan Randy Kusuma. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Proses Masa Reses Anggota DPRD Sukoharjo Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1.1 (2017): 118-133.

19 Samosir, Mario Malem. "Efektivitas Kebijakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan 1 Kota Surabaya." *Journal Publicuho* 7.4 (2024).

secara serius. Aspirasi yang disampaikan harus diterjemahkan menjadi kebijakan atau program yang relevan dan berdampak langsung. Jika masyarakat melihat bahwa reses membawa perubahan positif, maka mereka akan semakin aktif terlibat dan percaya bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari solusi nyata bagi kebutuhan mereka.

Selain itu, memberikan umpan balik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang bagaimana aspirasi masyarakat ditindaklanjuti juga sangat penting untuk menciptakan kepuasan. Masyarakat akan merasa dihargai jika mereka diberi informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi masukan mereka, serta dampak nyata dari kebijakan yang diterapkan. Komunikasi dua arah yang baik antara anggota DPR RI dan masyarakat, yang tidak hanya terjadi saat reses tetapi berlanjut setelahnya, dapat memastikan masyarakat merasa tetap terlibat dalam proses politik. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan mengurangi potensi ketidakpuasan yang bisa muncul akibat ketidakjelasan atau kurangnya transparansi dalam proses tersebut.

Secara keseluruhan, kepuasan masyarakat terhadap program reses mencerminkan sejauh mana program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dan menanggapi kebutuhan mereka. Tingkat kepuasan ini akan meningkat jika program reses dilakukan dengan prinsip transparansi, partisipasi aktif, dan tindak lanjut yang nyata terhadap aspirasi yang disampaikan. Sebaliknya, jika masyarakat merasa aspirasi mereka tidak ditanggapi dengan serius atau tidak membawa perubahan yang berarti, kepuasan akan menurun, yang bisa mengurangi partisipasi mereka dalam reses di masa depan. Oleh karena itu, keberhasilan program reses dalam meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat sangat bergantung pada cara pelaksanaannya dan seberapa efektif aspirasi yang terkumpul dapat diubah menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota DPR RI dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Kabupaten Gresik-Lamongan merupakan komponen krusial dalam sistem demokrasi representatif Indonesia, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Berdasarkan analisis teori sistem politik David Easton, teori perwakilan politik Pitkin dan Mansbridge, teori fungsi lembaga aspirasi perwakilan, penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas penyaluran aspirasi sangat bergantung pada kemampuan anggota DPR RI sebagai policy broker yang menjembatani kepentingan lokal dengan kebijakan nasional. Namun, faktanya terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan waktu anggota dewan dalam menjalankan reses, rendahnya partisipasi masyarakat akibat ketidakpuasan terhadap realisasi aspirasi sebelumnya, serta hambatan fiskal dalam implementasi kebijakan. Studi kasus di Gresik-Lamongan juga mengungkap bahwa meskipun DPR RI telah berhasil menyelesaikan sejumlah RUU penting dan meningkatkan pengawasan kebijakan, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realisasi kebijakan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme komunikasi politik dua arah, peningkatan transparansi proses legislatif, dan komitmen nyata dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar fungsi representasi dapat berjalan secara optimal dan memperkuat demokrasi deliberatif di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, D. N. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2018): 79–94.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA). "Deskripsi Singkat Kabupaten Lamongan." Diakses 12 Mei 2025. bappelitbangda.lamongankab.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Agustus 2023." Diakses 28 September 2025. gresikkab.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. "Statistik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024." Diakses 12 Mei 2025. lamongankab.bps.go.id.
- Badrus, U. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Bitton, D. "Pitkin, Hanna Fenichel, The Concept of Representation (Book Review)." *The Historian* 31, no. 1 (1968): 91.
- Kusuma, W., dan Sintasari, S. A. "Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah: Kerangka Hubungan Pusat Daerah." *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 1 (2023): 64–73.
- Macridis, R. C. "Comparative Politics and the Study of Government: The Search for Focus." *Comparative Politics* 1, no. 1 (1968): 79–90.
- Maharani, A. E. P., dan Kusuma, Y. R. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Proses Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk Mewujudkan Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2017): 118–133.
- Pito, T. A., Efriza, S., Fasyah, K., dan IP, S. Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi. Bandung: Nuansa Cendekia, 2022.
- Rahmawati, R., Pangesti, R. D., dan Abdillah, R. A. "Pemetaan Kondisi Jalan Berdasarkan IRI Roadmap di Kabupaten Gresik Wilayah Selatan." *Jurnal Riset Rekayasa Sipil* 4, no. 2 (2021): 83–94.
- Ridwansyah, M. "Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 838–858.
- Samosir, M. M. "Efektivitas Kebijakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan I Kota Surabaya." *Journal Publicuho* 7, no. 4 (2024).
- Samosir, O. Buku Materi Pembelajaran Sistem Perwakilan Politik. 2021.
- Sonni, A. F., Riandani, R., Unde, A. A., dan Gafar, A. "Aktivitas Humas DPRD Kota Palu sebagai Mediator Aspirasi Masyarakat." *Kinesik* 8, no. 2 (2021): 146–157.
- Supriyanto, B., Suprihanto, J., dan Nugroho, M. A. S. Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Magelang. Disertasi doktoral, STIE Widya Wiwaha, 2018.

Susanto, H., Ernungtyas, N. F., Prisanto, G. F., dan Afriani, A. L. "Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1)." *Jurnal Representamen* 7, no. 1 (2021).

Yuliani, W. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 83–91.